

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah suatu hal yang utama didalam kehidupan manusia era sekarang ini. Pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaannya memiliki pedoman atau kebijakan yang harus diikuti dan diterapkan. Pendidikan di Indonesia diatur atau memiliki pedoman yang dinamakan dengan kurikulum dan sekarang kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang menerapkan pembelajaran intrakurikuler secara variatif, sehingga materi pembelajaran dapat disampaikan secara lebih optimal. Model ini didukung oleh alokasi waktu yang memadai untuk pendalaman konsep dan penguatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan serta minat belajar peserta didik.<sup>1</sup>

Keberhasilan pendidikan ditentukan oleh keterpaduan berbagai unsur utama, khususnya pendidik, peserta didik, dan kurikulum. Pendidik merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan berasal dari beragam latar belakang lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Peran pendidik tidak terbatas pada guru formal, tetapi juga mencakup orang tua dan tokoh masyarakat, yang dituntut memiliki kompetensi profesional serta kesiapan mental dan fisik.

Peserta didik sebagai subjek pembelajaran merupakan individu yang memiliki potensi fisik dan psikologis yang terus berkembang, memerlukan bimbingan, serta perlakuan yang manusiawi. Selain berstatus sebagai pelajar pada satuan pendidikan, peserta didik juga memiliki kapasitas untuk mengembangkan kemandirian dalam proses belajar.

Memasuki unsur yang akan dijadikan sebagai bahan penelitian dalam unsur pendidikan adalah unsur kurikulum. Menurut Pasal 1 Butir 19 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan tentang

---

<sup>1</sup> Marlina, E. (2023). Pembinaan Penyusunan Modul Ajar Kurikulum Merdeka Belajar pada Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP). *Journal of Community Dedication*, 3(1), 88-97. <http://snaspro.uniba-bpn.ac.id/journal/index.php/JCD/article/view/451>

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.<sup>2</sup>

Secara garis besarnya kurikulum diartikan sebagai rencana untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan (*outcome*). Rencana tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan pedoman dalam mengembangkan strategi pembelajaran.

Kurikulum menempati posisi strategis dalam sistem pendidikan, karena berfungsi sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pembelajaran. Oleh sebab itu, perancangan dan pengembangannya harus dilandasi pertimbangan yang komprehensif dan sistematis. Kurikulum yang disusun secara cermat berperan sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan serta mendukung terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan produktif.

Kurikulum harus bersifat relevan dan adaptif terhadap perkembangan dunia pendidikan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum diperlukan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan dinamika sosial, kemajuan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan yang berkelanjutan memastikan kurikulum tetap efektif dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan serta memenuhi kebutuhan peserta didik dan masyarakat secara optimal.

Di Indonesia sudah terjadi perubahan dalam penerapan kurikulum pendidikan untuk menyesuaikan atau relevan dengan perkembangan dunia pendidikan dari masa ke masa. Menurut Ananda & Hudaida pada masa Orde Lama (1945–1965), kurikulum dipengaruhi ideologi sosialisme dan menempatkan pendidikan sebagai hak seluruh warga negara, dengan orientasi pembelajaran yang mulai mengarah pada tujuan dan pendekatan integratif. Menurut Manurung pada masa Orde Baru (1966–1998), kurikulum berfungsi sebagai implementasi UUD 1945 dengan penekanan pada penguasaan intelektual, di mana proses pembelajaran bersifat pasif dan berorientasi pada hafalan. Memasuki era Reformasi, pembaruan kurikulum diawali dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi

---

<sup>2</sup> Indonesia, P. R. (2003). Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi. <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-154>

(2004) yang memberikan otonomi kepada sekolah untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan KTSP 2006 yang berlandaskan regulasi nasional dan menekankan kemandirian satuan pendidikan. Selanjutnya, Kurikulum 2013 dikembangkan untuk memperkuat pendidikan karakter melalui penyesuaian standar lulusan, isi, proses, dan penilaian, serta penerapan pembelajaran tematik-integratif, pendekatan saintifik, dan penilaian autentik.

Menurut Fadhli kurikulum terakhir yang akan menjadi bahan penelitian adalah kurikulum merdeka didefinisikan sebagai desain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar dengan cara yang menyenangkan, santai, tenang, bebas tekanan, bebas stres, serta menampilkan bakat siswa. Kurikulum Merdeka ini digagas atau diciptakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2022 yang membawa perubahan signifikan dalam lanskap pendidikan Indonesia. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri yang dimana berfokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa yang lebih holistik, dengan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merancang pembelajaran.<sup>3</sup>

Kurikulum Merdeka dikembangkan sebagai respons terhadap berbagai kendala yang dialami pendidik dalam penerapan kurikulum sebelumnya, khususnya dalam penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran saintifik, dan penilaian hasil belajar. Permasalahan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, orang tua, dan peserta didik. Kurikulum ini menekankan penguatan pendidikan karakter melalui pengembangan nilai tanggung jawab, empati, dan kedulian sosial peserta didik.

Implementasi Kurikulum Merdeka menuntut kapasitas adaptasi organisasi yang kuat pada satuan pendidikan, termasuk Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Kurikulum ini mengedepankan pembelajaran berpusat pada peserta didik, fleksibilitas perencanaan, penguatan karakter, dan asesmen autentik. Namun, masih terdapat kesenjangan antara tuntutan tersebut dan kesiapan organisasi SKB dalam pelaksanaannya. Kesenjangan terutama tampak pada keterbatasan

<sup>3</sup> Fadhli, R. (2022). Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 5(2).

kompetensi sumber daya manusia, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan, dalam memahami dan menerapkan paradigma Kurikulum Merdeka. Pergeseran peran pendidik menjadi fasilitator pembelajaran belum sepenuhnya didukung oleh penguasaan strategi pembelajaran diferensiatif dan perencanaan berbasis kebutuhan peserta didik, serta kapasitas manajerial dan tata kelola yang adaptif.

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, sebanyak 369.875 satuan pendidikan di berbagai jenjang telah menerapkan Kurikulum Merdeka. Jumlah tersebut meliputi 146.913 satuan PAUD/TK/KB, 145.785 Sekolah Dasar (SD), 41.363 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan 14.088 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pada tingkat regional, Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki 6.986 satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan Kurikulum Merdeka, dengan sebaran di Kepulauan Seribu sebanyak 47 satuan, Jakarta Barat 1.484, Jakarta Selatan 1.534, Jakarta Pusat 895, Jakarta Timur 2.041, dan Jakarta Utara 985 satuan pendidikan. Fokus penelitian ini diarahkan pada wilayah Jakarta Pusat, khususnya jenjang Sekolah Dasar, yang berjumlah 258 satuan pendidikan, terdiri atas 159 sekolah negeri dan 99 sekolah swasta.<sup>4</sup>

Menurut BPMP Provinsi NTT, implementasi terbatas Kurikulum Merdeka dimulai pada 2021 melalui Sekolah Penggerak di 111 kabupaten/kota, kemudian pada 2022 diperluas untuk Jalur Mandiri. Data Pusat Kurikulum dan Pembelajaran (Puskurjar) Kemendikbudristek menunjukkan bahwa hampir 70 persen satuan pendidikan di Indonesia telah mengadopsi Kurikulum Merdeka melalui Program Sekolah Penggerak, SMK Pusat Keunggulan, dan Jalur Mandiri, termasuk 1.665 satuan pendidikan SKB/PKBM yang telah menerapkannya.

Berdasarkan pada hasil Grand Tour Observation (GTO) pada September 2025 bertempat di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat. Ditemukan hasil baik dari keunikan lembaga dan penelitian ini yang dimana PKBM/SKB 23 merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal berstatus negeri yang telah memperoleh akreditasi A, sebuah pencapaian yang menunjukkan mutu penyelenggaraan program dan manajemen kelembagaannya. Sanggar Kegiatan

<sup>4</sup> Kemdigbud, “Peta Sebaran Pelaksanaan IKM”, <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/pelaksana-ikm> diakses pada tanggal 6 Februari 2025.

Belajar (SKB) merupakan satuan pendidikan nonformal yang dirancang untuk menyediakan layanan pendidikan fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan kesetaraan, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat di luar sistem formal. SKB beroperasi di bawah dinas pendidikan daerah dan menyelenggarakan program nonformal yang terstruktur dan berjenjang bagi populasi beragam.

Penelitian ini menarik karena menelaah bagaimana lembaga pendidikan nonformal, yakni SKB, mengadopsi Kurikulum Merdeka dengan tantangan dan strategi yang berbeda dari sekolah formal, seperti keberagaman usia peserta didik, fleksibilitas pembelajaran, dan keterbatasan sarana. Warga belajar di SKB 23 memiliki latar usia, sosial, dan ekonomi yang beragam, sehingga adaptasi organisasi dan implementasi kurikulum menghadirkan tantangan khas. SKB 23 menyelenggarakan program Paket A, B, C, serta pelatihan keterampilan, termasuk tata boga, TIK, dan tata busana, sehingga kurikulum harus memadukan kompetensi akademik dan keterampilan hidup (life skills). Dengan SK pendirian dan operasional yang relatif baru (2023), adaptasi organisasi terhadap kebijakan Kurikulum Merdeka masih dalam tahap awal. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi dinas pendidikan atau BAN-PNF dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SKB lain maupun lembaga nonformal lainnya.

Urgensi dari penelitian ini adalah berbeda dengan sekolah formal yang memiliki struktur kurikulum, standar evaluasi, dan sistem manajemen nasional yang baku, SKB memiliki fleksibilitas tinggi dalam program, strategi pembelajaran, dan keterlibatan komunitas. Fleksibilitas ini mencerminkan karakter pendidikan nonformal yang kontekstual dan berbasis kebutuhan lokal. Meski demikian, tuntutan Kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berpusat pada peserta didik, asesmen autentik, dan inovasi pedagogis, sering belum selaras dengan kapasitas adaptasi organisasi SKB. Tantangan muncul pada aspek sumber daya manusia, manajemen pembelajaran, sarana, dan sistem penjaminan mutu, sehingga terdapat kesenjangan antara kebijakan kurikulum dan implementasinya di lingkungan nonformal. Perbedaan struktur dan fungsi antara SKB dan sekolah formal ini menegaskan urgensi penelitian, sekaligus

menekankan kontribusi utama dalam memahami penguatan kapasitas organisasi SKB untuk memenuhi tuntutan Kurikulum Merdeka secara efektif dan berkelanjutan. Adapun judul penelitian ini adalah “**Adaptasi Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka:Studi Kasus Di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat**”

## B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah adaptasi organisasi. Dalam hal ini memberikan Gambaran terkait sub fokus yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembentukan tim pengembang kurikulum
2. Komunikasi, kolaborasi, dan budaya organisasi
3. Penyesuaian struktur tugas dan tanggung jawab tutor
4. Tantangan, Hambatan, dan Strategi Pemecahan Masalah

## C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pembentukan tim pengembang kurikulum yang dilakukan di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat ?
2. Bagaimana komunikasi, kolaborasi, dan budaya organisasi yang dilakukan di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat ?
3. Bagaimana penyesuaian struktur tugas dan tanggung jawab tutor di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat ?
4. Bagaimana tantangan, hambatan, dan strategi pemecahan masalah di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat ?

## D. Tujuan Penelitian

Terdapat tujuan dalam penulisan penelitian ini yang diharapkan dapat membantu menambah pemahaman tentang penulisan penelitian ini. Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pembentukan tim pengembang kurikulum yang dilakukan di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat
2. Mendeskripsikan pola komunikasi, kolaborasi, dan budaya organisasi yang

dilakukan di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat

3. Mendeskripsikan penyesuaian struktur tugas dan tanggung jawab tutor di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat
4. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan strategi pemecahan masalah di SKB Negeri 23 Jakarta Pusat

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca baik dari segi teoritis maupun segi praktis. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori adaptasi organisasi, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan baru seperti Kurikulum Merdeka. Studi ini memberikan pemahaman mengenai cara institusi pendidikan menyesuaikan struktur, proses, dan budaya organisasi untuk mengakomodasi perubahan kurikulum. Hasil penelitian berpotensi membentuk kerangka konseptual tentang adaptasi organisasi pada pendidikan nonformal, yang dapat dijadikan rujukan bagi peneliti lain untuk menganalisis proses adaptasi di lembaga pendidikan lain atau dalam konteks kurikulum berbeda di masa depan.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Manfaat Bagi Bidang Perencanaan Kurikulum Pendidikan

Penelitian ini menyajikan data empiris mengenai adaptasi sekolah terhadap Kurikulum Merdeka, yang dapat menjadi dasar identifikasi aspek yang memerlukan penyesuaian dalam perencanaan kurikulum.

Misalnya, bila terdapat komponen kurikulum yang sulit diterapkan dampak dari kendala organisasi yang terjadi, perencana kurikulum dapat mempertimbangkan penyederhanaan atau panduan yang lebih jelas. Studi ini berperan sebagai “suara lapangan” yang mendukung perancangan kebijakan kurikulum yang lebih komprehensif, relevan, dan berkelanjutan.

#### b. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan gambaran nyata bagi guru, kepala sekolah, dan staf manajemen mengenai proses adaptasi sekolah terhadap

Kurikulum Merdeka, termasuk tantangan, strategi, dan keberhasilan dalam menata ulang struktur, tugas, dan komunikasi internal. Temuan ini dapat menjadi panduan atau inspirasi bagi sekolah lain yang akan mengimplementasikan kurikulum serupa. Bagi masyarakat, khususnya orang tua dan pemerhati pendidikan, studi ini menekankan bahwa penerapan kurikulum melibatkan adaptasi organisasi yang kompleks, bukan sekadar perubahan dokumen.

c. Manfaat Bagi Penulis

Proses penelitian dan penulisan ini melatih kemampuan penulis dalam meneliti secara sistematis dan mendalam, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan dan analisis data, hingga penarikan kesimpulan yang valid. Kegiatan ini juga meningkatkan keterampilan penulis dalam menyusun karya ilmiah yang logis, menggunakan bahasa formal dan lugas, serta mematuhi kaidah penulisan akademik. Selain itu, penulis memperoleh pemahaman mendalam tentang adaptasi organisasi, implementasi kurikulum, dan Kurikulum Merdeka, yang bermanfaat untuk pengembangan karir di bidang pendidikan.

